



Accepted:	Revised:	Published:
Maret 2024	April 2024	April 2024

## Multikulturalisme Pada Masa Ummayah Dalam Sejarah Peradaban Islam

**Yazidul Busthomi**

Institut Agama Islam Al-Qolam Malang

[busthomi@alqolam.ac.id](mailto:busthomi@alqolam.ac.id)

**Rudy Catur Rohman Kusmayadi**

Institut Agama Islam Al-Qolam Malang

[rudy@alqolam.ac.id](mailto:rudy@alqolam.ac.id)

### Abstract

*Multiculturalism in general is a concept of culture and variations in individual behavior caused by differences in race, religion and social structure, which is currently a hot issue and study material in the realm of social order. Islam has existed for centuries as the center of an advanced and diverse civilization. Along with the spread of Islam to various regions of the world, Islamic kingdoms grew and had prosperous centers of trade, science and culture. One of the main characteristics of Islamic civilization is the ethnic, cultural and religious diversity that exists within it. The structure of society in Damascus consists of four main components, namely: 1. The first social class, namely the Muslim-Arab nation occupies the highest class in social stratification in Damascus. 2. The second social class, namely the converts, people who have just converted to Islam. 3. The third social class, namely the non-Muslim group. 4. The fourth social class, namely the slaves who lived within the center of power of the Umayyad Daula in Damascus.*

**Keywords:** Multiculturalism; Ummayah; Islamic; Civilization.

### Abstrak

*Multikulturalisme secara umum adalah sebuah konsep budaya dan variasi perilaku individu yang disebabkan adanya perbedaan ras, agama, dan struktur sosial, dimana hal tersebut dewasa ini menjadi isu dan bahan kajian yang hangat dalam ranah tatanan sosial. Islam selama berabad-abad, telah hadir menjadi pusat peradaban yang maju dan beragam. Seiring dengan penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah dunia, kerajaan-kerajaan Islam tumbuh serta memiliki pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya yang makmur. Salah satu ciri khas utama dari peradaban Islam adalah keragaman etnis, budaya, dan agama yang ada di dalamnya. Struktur masyarakat di Damaskus terdiri dari empat komponen utama, yaitu: 1). Kelas sosial kesatu, yaitu bangsa Muslim-Arab menempati kelas tertinggi dalam stratifikasi sosial di Damaskus; 2). Kelas sosial kedua, yaitu golongan muallaf, orang yang baru memeluk agama Islam; 3). Kelas sosial ketiga, yaitu kelompok non muslim. 4).*

*Kelas sosial keempat, yaitu para budak yang hidup dalam lingkungan pusat kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus.*

**Kata Kunci:** *Multikulturalisme; Ummayah; Peradaban Islam.*

## **Pendahuluan**

Multikulturalisme dapat dipahami sebagai kebudayaan yang bermacam-macam dan yang terdiri dari dua budaya atau lebih. Sehingga secara bahasa dapat dipahami bahwa multikulturalisme sebagai gabungan antara multikultural dan isme yang dalam terminologi bermakna banyak budaya dan paham.<sup>1</sup> Multikulturalisme dipandang sebagai satu paradigma yang tak ternilai harganya, sebagai satu pola pikir dan pola sikap yang harus dikembangkan dan dibina. Oleh karena itu, pendidikan Islam berbasis wawasan multikulturalisme diinternalisasikan secara integral antara keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.<sup>2</sup>

Multikulturalisme, yang secara umum berarti “pandangan atau paham akan keragaman budaya dan perilaku yang disebabkan perbedaan ras, agama, dan struktur sosial”, kini terus menjadi bahan kajian dan pembahasan dalam melihat berbagai tatanan sosial, termasuk juga kaitannya dengan perkembangan Islam. Karenanya mengkaji hubungan Islam dan multikulturalisme khususnya merupakan masalah yang menarik karena Islam sebagai sistem doktrin yang berasal dari wahyu Tuhan selalu berkembang dalam konteks keragaman pemeluknya, sehingga sejarah agama ini juga selalu menunjukkan perbedaan dalam pemahaman dan perilaku pemeluknya.

Multikulturalisme secara umum adalah sebuah konsep budaya dan variasi perilaku individu yang disebabkan adanya perbedaan ras, agama, dan struktur sosial, dimana hal tersebut dewasa ini menjadi isu dan bahan kajian yang hangat dalam ranah tatanan sosial. Islam selama berabad-abad, telah hadir menjadi pusat peradaban yang maju dan beragam. Seiring dengan penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah dunia, kerajaan-kerajaan Islam tumbuh serta memiliki pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya yang makmur. Salah satu ciri khas utama dari peradaban Islam adalah keragaman etnis, budaya, dan agama yang ada di dalamnya. Berdasarkan sudut pandang sejarah, perkembangan Islam dan multikulturalisme dimulai pada masa awal lahirnya Islam, yaitu dari beliau Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, hubungan antara Islam dan multikulturalisme dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman masyarakat umum bahwa Islam sebagai sistem ajaran yang bersumber dari wahyu Tuhan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Sobirin Bagus dan Maskuri Bakri. *Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural pada Da'i Badan Koordinasi Masjid dan Musholla Kabupaten Kutai Timur*. : Jurnal Studi dan Sosial, Volume 8, Nomor 2, Oktober 2021. Halaman 105.

<sup>2</sup> Ahmad Hanif Fahruddin1, Maskuri, Hasan Busri. *Internalisasi Nilai Multikulturalisme melalui Pendidikan Islam; Interelasi Tri Sentra Pendidikan pada Masyarakat Multireligius Desa Balun Lamongan*, Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES) Volume 4, Nomor 1, Juni 2021. Halaman 57.

konteks keragaman masyarakat sebagaimana ditunjukkan dalam sejarah peradaban Islam.

Secara umum dalam sejarah pada masa kerajaan Islam dimana peradaban tumbuh dan berkembang dalam sistem komunitas Muslim. Dalam konteks ini, peradaban tingkat kemajuan, yang berarti perkembangan Islam pengikut dalam tatanan sosial dengan segala peraturan dan struktur di dalamnya. Komunitas menunjukkan identitas atas nama kesamaan keyakinan, pandangan, dan perilaku masyarakat berdasarkan ajarannya sebagai pemahaman, kepentingan, dan tujuan politik yang digunakan bersama oleh pemeluk Islam.<sup>3</sup>

Kerajaan Islam sebagai sebuah entitas politik dan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan mengelola keragaman agama dan budaya dalam masyarakat yang semakin global dan multikultural. Konsep moderasi beragama dalam konteks kerajaan Islam telah menjadi perdebatan yang semakin mendalam dan relevan. Hal ini mengingat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim dalam menjaga stabilitas sosial dan menjembatani perbedaan budaya dan agama. Peran dan pemahaman moderasi beragama yang benar dalam Kerajaan Islam menjadi sangat signifikan dalam menghadapi kompleksitas dinamika sosial kontemporer. Sebagai entitas yang berakar dalam nilai-nilai agama Islam, Kerajaan Islam memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan harmoni antar agama, keadilan sosial, dan kemajuan peradaban Islam.

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan kualitas sumberdaya manusia bukan hanya dilakukan melalui pendidikan formal, namun sampai saat ini dipercaya bahwa pendidikan formal merupakan wahana utama pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatik dan berjenjang.<sup>4</sup> Pendidikan Islam multikultural pada prinsipnya adalah pemahaman dan pelaksanaan hidup muslim bersama, bergaul dengan sesama manusia, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim, yang dalam kenyataan keberadaannya memiliki keragaman, atau tegasnya secara imani dan faktual Allah swt. sengaja menciptakan manusia beragam. Keragaman itu berupa, ras, suku bangsa, budaya maupun agama.

Dalam perspektif inilah diperlukan nilai-nilai keberagaman atau multikultural sebagai salah satu tujuan pendidikan Islam. Adapun nilai-nilai Islam yang dapat dikembangkan sebagai tujuan dijadikan dalam pendidikan multikulturalisme antara lain nilai: empati, kasih sayang, kebersamaan, menghargai perbedaan, rela berkorban, tenggang rasa, toleransi, dan tolong menolong.<sup>5</sup> Nilai-nilai multikulturalisme dalam

<sup>3</sup> Febi Januar al-Hikami. *Moderasi Beragama dalam Kerajaan Islam: Memahami Multikulturalisme dan Peradaban Islam*. Jurnal Inovasi Pendidikan, Volume 1, Nomor 3, 2023. Halaman 327.

<sup>4</sup> M. Tholchah Hasan, 2011, *Peran Penelitian dalam Mengangkat Kemampuan Sumber Daya Manusia untuk Menunjang Pembangunan di Indonesia*. Malang: Visipress Media. Halaman 8.

<sup>5</sup> H.M. Junaidi Ghony, *Konsep Dasar Multikulturalisme dalam Kurikulum*, Makalah Bahan Perkuliahan. Halaman 198-203.

bahasa lain, akar-akar inklusif dalam multikulturalisme Islam meliputi nilai; at-ta’aruf atau saling mengenal (Q.S Al-Hujurat.13), attawassuth atau moderat/adil (Q.S. Al-Baqarah.143), at-tasamuh atau toleran (Q.S. Ali ‘Imran. 159), at-ta’awun atau tolong menolong (Q.S. Al-Ma’idah. 2), at-tawazun atau harmoni (Q.S. Al-Qashash. 77).<sup>6</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau bisa disebut *library research*, yakni sebuah penelitian yang mengkaji dan mencari informasi-informasi serta data-data yang secara keseluruhan berasal dari bahasa tertulis yang terkait dan relevan dengan judul yang sedang diteliti.<sup>7</sup> Sedangkan pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bilken dan Bodan pendekatan kualitatif memiliki lima karakteristik tersendiri, yaitu: 1). Menggunakan latar belakang alami sebagai sumber data penelitian sedangkan peneliti menjadi instrumen kunci keberhasilan dan kualitas penelitian; 2). Data yang disajikan dalam penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk bahasa yang terdiri dari kata-kata dan gambar-gambar jika diperlukan bukan dalam bentuk angka atau prosentase; 3). Penelitian kualitatif lebih memprioritaskan proses dari pada hasil; 4). Dalam menganalisa data penelitian kualitatif lebih cenderung dengan cara induktif; 5). Dalam penelitian kualitatif ini makna merupakan hal esensial dan signifikan.<sup>8</sup>

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Multikulturalisme Era Umayyah di Damaskus

Umayyah adalah putra dari Abdul Syam dan keturunan Abdul Manaf.<sup>9</sup> Kekuasan Daulah Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun di Damaskus.<sup>10</sup> Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus (661-750) didasarkan pada kompleksitas masyarakat yang menyebar, baik dalam pertumbuhan agama yang berbeda komunitas atau komunitas Muslim dalam beragam etnis daerah. Pada masa kekhalifahan Damaskus Umayyah, bahkan meskipun pandangan politik dikembangkan, itu tidak menghasilkan masyarakat monokultural. Sebagai gantinya, Komunitas Muslim Arab pada waktu itu didasarkan pada etnis lokal, sehingga peradaban Islam dapat berkembang dalam pola multikultural dalam lingkup politik Arab. Dominasi politik Arab dalam

<sup>6</sup> M. Tholchah Hasan, *Akar-Akar Nilai Inklusif dalam Multikulturalisme Islam*, Makalah Bahan Kuliah Multidisiplin Pendidikan Islam Multikultural, Universitas Islam Malang.

<sup>7</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), 54.

<sup>8</sup> Abd. Muqit, “Memperkuat Nasionalisme Kebangsaan Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani Dan M. Quraish Sihab,” *Ta’wiluna* 3, no. 2 (October 31, 2022): 236–50, <https://doi.org/10.58401/TAKWILUNA.V3I2.751>.

<sup>9</sup> Fatah Syukur. 2020. *Sejarah Peradaban Islam*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra. Halaman 69.

<sup>10</sup> Badri Yatim. 2021. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Halaman 43.

pembangunan Peradaban Islam pada masa ini sebagian besar terbatas pada interaksi antara Arab-Muslim dan budaya non Muslim.

Peranan penting dalam meletakkan dasar-dasar kejayaan Islam, termasuk konteks dalam membangun peradabannya. Mempelajari lebih dalam tentang peradaban di era ini dari perspektif multikulturalisme akan terkesan bertentangan dengan sejarah Islam. Karena akal sehat bahwa Daulah Umayyah terutama yang berpusat di Damaskus terkenal dengan kebijakan Arabisasi. Bahkan, kebijakan politik administratif ini peran komunitas non Arab dalam konteks Islam perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah di Timur atau barat. Seperti yang dijelaskan oleh Gerald Hawting, arabisasi adalah tidak lebih dari konstruksi dan perluasan budaya yang ditandai dengan penerapan bahasa Arab di setiap daerah di bawah pendudukan Islam (Daulah Umayyah) pada waktu itu. Tapi di beberapa bagian negara, orang-orang Yahudi dan Kristen tetap bagian penting dari Damaskus dan mempertahankan agama mereka tradisi, meskipun terjadi perubahan bahasa. Sementara itu, reaksi terhadap arabisasi berbeda di Persia. Di sana, orang-orang Yahudi dan Kristen mempertahankan kehidupan pra Islam mereka bahasa, baik dalam percakapan sehari-hari maupun karya sastra.

Pada struktur masyarakat Damaskus yang terdiri dari empat komponen utama; Muslim Arab, non Arab Muslim, non Muslim, dan budak. Muslim Arab Mereka adalah penguasa Daulah Umayyah, keduanya di kesultanan atau asosiasi bangsawan Arab. Tapi ini tidak berarti bahwa Muslim Arab adalah mayoritas di Damaskus, ibukota Daulah Umayyah Timur, Damaskus telah berubah menjadi kota yang bercirikan Islam, meskipun sebenarnya orang-orang (termasuk mereka yang tinggal di bagian pedesaan yang kecil, desa, atau pegunungan) pada umumnya adalah orang Kristen di masa lalu. Mereka yang terus mempertahankan kekristenan mereka mempertahankan identitas budaya dan agama pada masa Daulah Umayyah kepemimpinan. Di bagian selatan Damaskus, khususnya di Lebanon, orang-orang tetap menjadi Kristen dan digunakan Bahasa Syria untuk percakapan sehari-hari mereka selama berabad-abad sejak pemerintahan Daulah Umayyah. Dalam catatan persaingan dalam agama, ras, sosial, dan bahasa mengkonstruksi dinamika sosial di Damaskus.<sup>11</sup>

Struktur masyarakat di Damaskus terdiri dari empat komponen utama, yaitu bangsa Muslim-Arab, bangsa-bangsa Muslim nonArab, bangsa-bangsa non-Arab, dan budak.

### 1. Kelas Sosial Kesatu

Bangsa Muslim-Arab menempati kelas tertinggi dalam stratifikasi sosial di Damaskus. Mereka adalah para elit penguasa Daulah Umayyah, baik dari keluarga

<sup>11</sup> Febi Januar al-Hikami. *Moderasi Beragama dalam Kerajaan Islam: Memahami Multikulturalisme dan Peradaban Islam*. Jurnal Inovasi Pendidikan, Volume 1, Nomor 3, 2023. Halaman 330.

kerajaan maupun kelompok aristokrat Arab. Pengeluaran negara untuk membiayai golongan teratas ini cukup tinggi. Ketika Khalifah al-Walid I berkuasa, anggaran pemerintah untuk subsidi atas golongan ini yang berada di Damaskus mencapai 45.000. Berbeda halnya ketika Marwan I menjadi khalifah, kota Hims beserta distriknya menganggarkan dana sebesar 20.000 untuk biaya pensiun pada pejabat kekhalifahan. Meskipun menempati strata tertinggi dalam pelapisan sosial di kota Damaskus, bukan berarti golongan Muslim-Arab ini adalah golongan mayoritas.<sup>12</sup> Damaskus sebagai ibu kota kekhalifahan Daulah Umayyah Timur, telah bertransformasi menjadi sebuah kota dengan ciri khas Islam, padahal sebelumnya penduduk Damaskus, bahkan hingga ke kota-kota kecil, pedesaan, dan daerah pegunungan, secara umum adalah penganut agama Kristen.

Penduduk yang masih menganut agama Kristen tetap mempertahankan identitas kultural dan agama mereka di tengah kekuasaan Daulah Umayyah. Di wilayah selatan Damaskus, khususnya wilayah Libanon, para penduduknya tetap memeluk agama Kristen dan menggunakan bahasa Suriah sebagai bahasa sehari-hari mereka, beberapa abad setelah Daulah Umayyah berkuasa. Hal ini mengindikasikan bahwa proyek Arabisasi yang dilakukan Daulah Umayyah tampak tidak menyentuh akar-rumput (grass-roots) penduduk Damaskus dan sekitarnya, sehingga tingkat keragaman kultural tetap memiliki eksistensi pada masa Daulah Umayyah di Timur. Dalam catatan Philip K. Hitti, selama kekuasaan Daulah Umayyah, konflik fisik di Damaskus tidak pernah terjadi, tetapi persaingan antar agama, ras, sosial, dan terutama bahasa mewarnai dinamika sosial di Damaskus.

## 2. Kelas Sosial Kedua

Kelas sosial kedua dalam stratifikasi masyarakat di kota Damaskus adalah golongan muallaf, orang yang baru memeluk agama Islam. Dengan demikian, mereka diakui secara penuh sebagai warga negara Muslim. Mengenai kelas sosial ini, banyak diduga bahwa fanatisme kesukuan bangsa Arab seringkali merintangi proses perwujudan kesetaraan setiap warga negara. Meskipun demikian, dalam hal pemilikan tanah, baik warga Muslim maupun non-Muslim memiliki kewajiban yang sama untuk membayar pajak. Kelas sosial ini dinamai mawali sehingga menempati strata sosial terendah di internal komunitas umat Islam. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong afiliasi mereka pada beberapa kelompok pemberontak kekhalifahan, khususnya pemberontak Syiah di Irak atau kelompok Khawarij di Persia. Kedua kelompok tersebut sejak awal telah menjadi pihak oposisi terhadap Daulah Umayyah.

Keterlibatan mereka dalam kelompok-kelompok oposisi tersebut merupakan bentuk ketidak puasan mereka terhadap kebijakan Daulah Umayyah. Akan tetapi, dari sisi ketaatan keagamaan, golongan mawali memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan kalangan Muslim-Arab, khususnya para elit politik Daulah Umayyah. Ketaatan keagamaan para mawali ini mendorong mereka untuk berada di garda

---

<sup>12</sup> Philip K. Hitti, *The History of The Arabs*, terj., (Bandung: Serambi, 2008). Halaman 74.

terdepan dalam memerangi golongan non-Muslim. Oleh karena itu dicatat bahwa kelompok Muslim paling tidak toleran pada masa kekuasaan Daulah Umayyah adalah para muallaf yang sebelumnya beragama Yahudi dan Kristen.

Dalam konteks pengembangan kebudayaan dan seni, para mawali ini juga menjadi salah satu aktor penting. Hal ini didorong oleh kesadaran historis mereka sebagai pewaris kebudayaan yang lebih tua dari kebudayaan Islam-Arab itu sendiri. Di sisi lain, hal ini juga sebagai simbol kompensasi atas posisi kurang menguntungkan yang mereka peroleh dalam struktur sosial di Damaskus. Tidak menjadi elit dalam bidang politik, maka mereka berusaha melakukan mobilisasi vertikal untuk menjadi elit di bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan seni.

Para mawali mulai bersaing dalam dunia politik dengan golongan muslim-Arab setelah mereka mampu mengungguli golongan muslim-Arab tersebut di bidang-bidang non-politik, seperti, seni dan ilmu pengetahuan.<sup>13</sup> Keterlibatan mereka dalam dunia politik yang telah lama didominasi oleh golongan muslim Arab itu ditunjang oleh perkawinan mereka dengan perempuan-perempuan yang berasal dari golongan muslim-Arab sendiri. Tingkat perkawinan campur antara golongan Arab dengan golongan nonArab ini cukup tinggi sehingga berdampak pada berkurangnya keaslian darah suku Arab itu sendiri.

### 3. Kelas Sosial Ketiga

Kelas ketiga dalam stratifikasi sosial di Damaskus adalah kelompok non muslim, baik yang beragama Yahudi, Kristen, Sabā, maupun sekte-sekte kepercayaan lainnya. Mereka telah mengikat perjanjian damai dengan Daulah Umayyah sehingga dinamai Ahlu Dzimmah. Atas perjanjian tersebut, mereka berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah Daulah Umayyah. Pihak pemerintah Daulah Umayyah, atas pajak yang mereka bayar, berkewajiban memberikan perlindungan kepada mereka sebagai warga negaranya. Pembayaran pajak ini berkaitan dengan pajak tanah dan pajak perorangan. Dalam konteks proses hukum, baik komunitas Yahudi, Kristen, maupun Sabā tetap berada di bawah yurisdiksi pemimpin agama mereka masing-masing secara otonom. Akan tetapi jika persoalan hukum tersebut melibatkan warga muslim, maka hukum Islam tetap dijalankan terhadap warga muslim tersebut.

Awalnya, golongan Ahlu Dzimmah itu terbatas hanya mencakup golongan Yahudi dan Kristen (Nasrani), tetapi pada proses selanjutnya, cakupan Ahlu Dzimmah ini diperluas hingga mencakup golongan penyembah api (Majusi atau Zoroaster), penyembah berhala di wilayah Harran, dan suku Berber yang juga penyembah berhala. Kelompok-kelompok ini memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan agama mereka masing-masing sebagai sesama warga negara dalam kekuasaan Daulah Umayyah. Baik terhadap para pengikut kepercayaan Zoroaster di Persia maupun Berber di Afrika, pihak Daulah

<sup>13</sup> Philip K. Hitti, *The History of The Arabs*, terj., (Bandung: Serambi, 2008). Halaman 76.

Umayyah memberikan tiga opsi, yaitu: (1) masuk Islam, (2) diperangi, (3) atau membayar pajak dan tetap memeluk agama mereka.

Khusus di daerah Libanon, suatu wilayah yang pada masa Daulah Umayyah tidak dapat ditaklukan, golongan Kristen justru berada dalam kelas paling tinggi. Mereka bahkan mampu memberikan perlawanan terhadap Daulah Umayyah, khususnya pada masa Khalifah Abdul Malik berkuasa.

Meskipun berada dalam kelas cukup rendah dalam stratifikasi sosial Daulah Umayyah Timur, komunitas Kristen memiliki posisi dan fungsi yang cukup penting dalam struktur sosial Daulah Umayyah. Beberapa anggota komunitas Kristen ada yang menjadi penyair, dokter, sekretaris keuangan Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan istri Muawiyah pun ada yang beragama Kristen. Namun saat Khalifah Al Walid I berkuasa, ia sempat menghukum mati seorang kepala suku Arab-Kristen dari Bani Taghib karena menolak masuk Islam.

#### 4. Kelas Sosial Keempat

Kelas terendah adalah para budak yang hidup dalam lingkungan pusat kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus. Tradisi perbudakan telah berlangsung sangat lama, jauh sebelum Islam lahir, sebagai salah satu tradisi rumpun bangsa Semit kuno. Akan tetapi, meskipun Islam tidak melestarikannya, kondisi perbudakan pada masa Daulah Umayyah jauh lebih baik dari pada periode sebelum Islam datang. Budak-budak ini berasal dari wilayah Afrika Timur dan Afrika bagian Tengah yang berkulit hitam, Fargana atau Turkistan Cina yang berkulit kuning, Eropa bagian timur dan selatan yang berkulit putih.

Perdagangan budak menjadi bisnis yang berkembang pesat pada masa Daulah Umayyah. Para budak ini biasanya bekerja di sektor-sektor pekerjaan kasar, seperti pembantu rumah tangga dan pekerjaan lainnya. Mereka tetap memiliki peluang untuk melakukan mobilisasi sosial. Misalnya ketika majikannya memerdekaan dirinya, maka ia akan menjadi rekan kerja majikannya. Bahkan jika majikannya meninggal dan tidak memiliki ahli waris, maka harta kekayaan majikannya akan menjadi hak budak tersebut.<sup>14</sup>

### B. Struktur Masyarakat Multikultural Daulah Umayyah Barat

Muslim Arab komunitas yang menetap di Andalusia setelah pembebasan berasal dari selatan Arab (Suku Yaman) dan utara Arab (Suku Mudhari). Sebagian besar Suku Mudhari dihuni Toledo, Zaragoza, Sevilla, Valencia, dan lain-lain; ketika Suku Yaman mendiami Granada, Cordoba, Sevilla, Murcia, dan Badajoz. dua kelompok umum berdasarkan karakteristik budaya mereka: (a) komunitas Kristen yang masih mempertahankan kepercayaan lama mereka dan tradisi. (b) komunitas Kristen yang masih terjaga kepercayaan mereka, tetapi meniru budaya Arab terutama bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari, tulisan, atau aspek lainnya.

<sup>14</sup> Dudung Abdurahman. 2014. *Komunitas-Multikultural dalam Sejarah Islam Periode Klasik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Halaman 58.

Kelompok yang terakhir ini dikenal sebagai Musta'ribah. Semua komunitas termasuk Muslim Arab, Kristen, dan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari, tulisan, atau aspek lainnya. Kelompok ini dikenal sebagai Musta'ribah. Semua komunitas—termasuk Muslim Arab, Kristen, dan Yahudi memegang peran penting dalam pengembangan budaya di Kordoba. Komunitas Kristen masih bebas menggunakan gereja mereka dan pemimpin agama mereka masih diizinkan untuk mengenakan seragam agama mereka.<sup>15</sup>

Komposisi penduduk Andalusia saat Daulah Umayyah berkuasa sangat beragam. Kelompok penduduk utama yang berdiam diri di Andalusia adalah komunitas Muslim-Arab dan suku Berber. Keduanya merupakan aktor penting dalam proses pembebasan Andalusia untuk menjadi pusat kekuasaan Daulah Umayyah di Barat. Kelompok penduduk lainnya adalah komunitas Kristen sebagai penduduk asli Andalusia. Sebagian anggota komunitas ini ada yang kemudian memeluk Islam setelah pembebasan Andalusia dari penindasan bangsa Ghotia Barat. Komunitas Muslim-Arab yang menetap di Andalusia pasca pembebasan berasal dari wilayah selatan Arab (Suku Yamani) dan wilayah utara Arab (Suku Mudhari). Mayoritas Suku Mudhari mendiami kota Toledo, Saragosa, Sevilla, Valencia, dan lain-lain. Sementara itu, Suku Yamani kebanyakan menetap di Granada, Cordoba, Sevilla, Murcia, dan Badajoz.<sup>16</sup>

Adapun bangsa Berber memperoleh daerah pemukiman di wilayah perbukitan yang kering tandus di bagian utara Andalusia. Bangsa Arab tetap tidak memberikan tempat tinggal yang layak bagi mereka meskipun bangsa Berber ini memiliki peran yang cukup penting dalam proses pembebasan Andalusia. Kondisi tempat tinggal di perbukitan sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Berber. Sebab daerah itu berbatasan langsung dengan komunitas Kristen yang masih melakukan perlawanan terhadap Daulah Umayyah II. Meskipun golongan Kristen mampu dikalahkan, tetapi sisa-sisa komunitas Kristen ini tetap bergerilya untuk melakukan perlawanan.

Sementara bangsa Berber harus hidup dalam ancaman serangan musuh di perbukitan, komunitas bangsa Arab justru mendapatkan wilayah-wilayah lembah yang terlindung dari ancaman serangan musuh. Merasa didiskriminasi dengan kondisinya yang tidak menguntungkan, bangsa Berber di Andalusia lalu memusuhi bangsa Arab-Muslim yang dianggap telah mengkhianati jasa mereka. Mereka memusuhi bangsa Arab di Andalusia sebagaimana mereka memusuhi bangsa Arab dan Romawi di Afrika Utara, khususnya daerah Maroko. Kondisi ini mengakibatkan perpecahan internal di dalam tubuh umat Islam. Pada proses perjalanan sejarah Daulah Umayyah di Andalusia, bangsa Berber ini tidak lebih dari sekedar alat dari berbagai kepentingan politik untuk sukses kekuasaan mereka.

<sup>15</sup> Febi Januar al-Hikami. *Moderasi Beragama dalam Kerajaan Islam: Memahami Multikulturalisme dan Peradaban Islam*. Jurnal Inovasi Pendidikan, Volume 1, Nomor 3, 2023. Halaman 330.

<sup>16</sup> Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*. Halaman 581.

Kelompok penduduk lainnya di Andalusia pada masa kekuasaan Daulah Umayyah adalah komunitas Kristen dan Yahudi. Komunitas Kristen di Andalusia ini dapat diidentifikasi ke dalam dua kelompok besar, berdasarkan karakteristik kebudayaannya, yaitu: (1) komunitas Kristen yang tetap menjalankan kepercayaan dan tradisi lama mereka. (2) komunitas Kristen yang meskipun tetap berkeyakinan Kristiani, tetapi menampakkan imitasi kebudayaan terhadap tradisi Arab, khususnya bahasa Arab, misalnya dalam berbicara sehari-hari, menulis, dan adat istiadat Arab lainnya. Kelompok ini dikenal dengan sebutan Musta'ribah.

Menurut Robert Hillerbrand, baik komunitas Muslim-Arab, Kristen, maupun Yahudi memerankan peranan penting dalam perkembangan kebudayaan di kota Cordoba. Kolaborasi budaya antara Islam, Kristen, dan Yahudi merupakan salah satu identitas kebudayaan di Andalusia, khususnya kota Cordoba pada masa Daulah Umayyah. Khalifah Abdurrahman I bahkan menggunakan sebagian gereja Santo Vinsensius sebagai tempat ibadah umat Islam sedangkan bagian gereja lainnya dipergunakan oleh komunitas Kristen. Hal tersebut merupakan simbol kerukunan antar umat beragama di Andalusia. Komunitas Kristen tetap diperbolehkan menggunakan gereja-gereja mereka dan para pemuka agama Kristen tetap diizinkan untuk menggunakan pakaian keagamaan mereka.

Menurut Kees De Jong, kebudayaan Yahudi juga berkembang pesat di kota Cordoba. Salah satu tokoh Yahudi yang memiliki peran penting dalam pemerintahan Daulah Umayyah adalah Hasday bin Shaprut. Ia adalah dokter istana ketika Abdurrahman III dan al-Hakam II berkuasa, karena keahliannya menyembuhkan berbagai penyakit. Selain sebagai dokter, Hasday bin Shaprut juga seorang cendekiawan. Ia pernah memimpin penerjemahan ke dalam bahasa Arab sebuah manuskrip berbahasa Yunani. Ia bahkan yang memulai pencairan manuskrip itu hingga ke kerajaan Bizantium. Setelah diterjemahkan, isi manuskrip itu sangat bermanfaat bagi penduduk Cordoba.<sup>17</sup> Para penyair, ahli filsafat, dan cendekiawan berdatangan ke kota Cordoba dan ikut memperkaya peradaban di Cordoba.

Ada satu konsep terkenal terkait dengan kehidupan yang beragam di Andalusia. Konsep tersebut adalah “Convivencia”, Ihsan Ali-Fauzi mengistilahkannya dengan “co-eksistensi”, yaitu kondisi sosial yang terdiri dari berbagai kelompok komunitas yang disatukan dalam satu kesatuan politik, dalam konteks ini Daulah Umayyah. Konsep atau istilah tersebut dipopulerkan oleh seorang filolog sekaligus sejarawan Spanyol, Americo Castro. Istilah “Convivencia” digunakan untuk mendeskripsikan situasi sosio-kultural di Andalusia sejak abad kedelapan hingga ke limabelas Masehi, yaitu ketika Daulah Umayyah berkuasa. Dalam rentang waktu berabad-abad tersebut, berbagai unsur budaya dan agama yang berbeda, khususnya Islam, Kristen, dan Yahudi hidup bersama dan

---

<sup>17</sup> Kees De Jong, “Al Andalus di Bawah Kekuasaan Daulah Umayyah di Cordoba (756-1031): Suatu Masyarakat Pluralistik yang Beradab”. *Gema Teologia* (Jurnal Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana). Vol. 34 No. 1 April 2010. Halaman 19.

berinteraksi satu sama lain, melakukan interpenetrasi satu sama lain, sekaligus saling pengaruh-mempengaruhi secara kreatif terhadap kebudayaan masing-masing.

Bagi Castro, sebagaimana dijelaskan Ihsan Ali-Fauzi, pergumulan kebudayaan antara Islam, Kristen, dan Yahudi berlangsung dengan kesadaran-diri pada masing-masing komunitas tersebut. “Convivencia” merupakan bentuk kehidupan bersama dalam kesejajaran, kolektifitas, dan kesadaran diri atas identitas kultural mereka masing-masing. Dalam co-eksistensi tersebut, setiap komunitas saling meminjam unsur-unsur budaya secara kreatif tanpa kehilangan identitas kulturalnya sendiri. Meskipun interpretasi historis yang dinilai terlalu idealistik tersebut banyak dikritik karena mengesampingkan dinamika sosial bahkan konflik yang seringkali mewarnai dinamika hubungan antar ketiga komunitas utama di Andalusia tersebut, tetapi usahanya untuk menjadikan Andalusia sebagai banchmarking sebuah kehidupan sosial yang pluralistik, kosmopolit, dan egaliter tetap merupakan langkah yang berharga.<sup>18</sup>

### C. Pola Kebijakan Politik Multikultural

Dalam catatan sejarah, konflik antar agama dalam kehidupan sosial di Damaskus relatif tidak ditemukan. Konflik sosial yang ada hanya terjadi di antara beberapa suku. Dua suku yang seringkali terlibat dalam konflik adalah suku Himyariyah dan Mudariyah. Kerukunan antar umat beragama ini didorong oleh kebijakan pemerintah Daulah Umayyah yang memiliki perhatian berimbang dan adil terhadap penganut agama lainnya. Para khalifah Daulah Umayyah memberikan perlindungan secara proporsional terhadap tempat-tempat suci agama-agama di Damaskus, seperti gereja, katedral, sinagoge, dan tempat suci lainnya. Pihak penguasa Daulah Umayyah bahkan pernah mengambil kebijakan perbaikan bangunan gereja Kristen di wilayah Edessa yang rusak karena bencana gempa bumi. Biaya rehabilitasi bangunan itu diambil dari dana yang dihimpun dari umat Islam.

Terkait dengan eksistensi perempuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus, maka hal tersebut memiliki relevansi tersendiri dengan nilai-nilai kesejarahan dalam konsep multikulturalisme. Secara umum, perempuan di Damaskus memang ditempatkan secara terpisah dengan laki-laki di ruang publik. Namun hal tersebut tidak berarti mendorong terjadinya diskriminasi dan penindasan. Bahkan perempuan-perempuan di Damaskus memiliki kesempatan dan akses yang sama dengan laki-laki, khususnya dalam pengembangan keilmuan dan pendidikan. Pihak Daulah Umayyah memberikan kebebasan kepada perempuan untuk mengembangkan minat dan hasrat mereka yang tinggi terhadap aktifitas di bidang pendidikan. Sejarah mencatat bahwa ada beberapa ilmuan populer dari kalangan perempuan di Damaskus pada masa Daulah Umayyah, seperti Putri Husain dan Sakhina. Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah Daulah Umayyah yang cenderung egaliter dan tidak

<sup>18</sup> Dudung Abdurahman. 2014. *Komunitas-Multikultural dalam Sejarah Islam Periode Klasik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Halaman 62.

diskriminatif, khususnya terkait dengan keberadaan dan peran perempuan di sektor publik.<sup>19</sup>

Umar bin Abdul Aziz tidak hanya terkenal dengan ketaatan agamanya. Tetapi juga kebijakan-kebijakannya terhadap kelompok minoritas yang lebih toleran dan egaliter. Kondisi lebih baik para non-Muslim ini dialami ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa. Ia mengambil kebijakan untuk mengurangi beban pajak terhadap golongan Ahlu Dzimmah ini. Umar bin Abdul Aziz (Umar II) adalah satu-satunya khalifah Daulah Umayyah yang memberikan berbagai pembebasan atas diskriminasi terhadap golongan Kristen. Beberapa dokumen tentang kebijakan Umar II ini mengindikasikan adanya hubungan yang lebih intim antara umat Islam dengan komunitas Kristen pada masanya dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Beberapa kebijakan khalifah sebelum Umar II yang memberatkan golongan Ahlu Dzimmah di antaranya golongan Kristen dilarang untuk menduduki berbagai jabatan publik, mengenakan surban, menggunakan pelana kuda kecuali pelana berkantong, mendirikan tempat ibadah, dan mengeraskan suara ketika umat Islam shalat. Golongan Kristen juga diharuskan memotong rambut dengan model rambut poni. Di samping itu, sebelum Umar II berkuasa, seorang muslim yang membunuh orang Kristen hanya dijatuhi hukuman denda. Kesaksian seorang Kristen yang memberatkan orang Islam tidak akan diterima dalam sidang peradilan. Aturan-aturan diskriminatif ini juga berlaku terhadap komunitas Yahudi. Kedua kelompok ini tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan.

Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya kondisi-kondisi tersebut berubah seiring pergantian khalifah Daulah Umayyah. Misalnya ketika Hisyam berkuasa, gubernur Irak, Khalid bin Abdullah membangun sebuah gereja di Kufah. Selain itu, ia juga memberikan kebebasan baik kepada komunitas Yahudi maupun Kristen untuk mendirikan tempat ibadah mereka masing-masing. Hisyam bahkan pernah mengangkat seorang penganut kepercayaan Zoroaster sebagai pejabat pemerintahan.

Pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia juga mengeluarkan kebijakan yang mendorong terjadinya proses imitasi dan akulturasi budaya antara entitas sosial yang ada di Andalusia. Daulah Umayyah di Andalusia terkenal dengan kebijakan-kebijakannya yang sangat menghormati pemeluk agama non-Islam, khususnya Kristen dan Yahudi. Baik komunitas Kristen, Yahudi, maupun Muslim-Arab dapat berinteraksi secara bebas dan setara dalam aturan sosial yang berlaku. Khusus terhadap komunitas Kristen dan Yahudi, pemerintah Daulah Umayyah bahkan menempatkan keduanya ke dalam jabatan pejabat sipil maupun militer.<sup>20</sup>

Terhadap komunitas Kristen, pemerintah Daulah Umayyah memilihkan seorang pemimpin komunitas (Count) yang berasal dari anggota komunitas mereka

<sup>19</sup> Dudung Abdurahman. 2014. *Komunitas-Multikultural dalam Sejarah Islam Periode Klasik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Halaman 63.

<sup>20</sup> Dudung Abdurahman. 2014. *Komunitas-Multikultural dalam Sejarah Islam Periode Klasik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Halaman 65.

sendiri. Komunitas Kristen juga memiliki perwakilan untuk menyampaikan aspirasi mereka di istana kekhilafahan Daulah Umayyah. Pihak Daulah Umayyah juga menunjuk orang tertentu sebagai pemungut pajak terhadap komunitas Kristen ini.

Sama halnya dengan komunitas Kristen, komunitas Yahudi juga memiliki otonomi administrasi tersendiri. Komunitas Yahudi bahkan memiliki sebuah wilayah otonom sendiri, berjarak sekitar 40 mil dari kota Cordoba. Wilayah tersebut memiliki hak istimewa untuk tidak dimasuki oleh warga muslim Andalusia. Hal ini mengindikasikan bahwa di bawah kekuasaan Islam, warga Yahudi tetap memiliki bargaining position tersendiri. Hal lain yang perlu dicatat adalah sosok Ibnu Syibruth yang berasal dari komunitas Yahudi dan memperoleh jabatan untuk menyambut para duta dari berbagai negara yang datang ke Cordoba. Ibnu Syibruth tercatat menjadi penyambut duta dari Kaisar Konstantine II dari Bizantium dan utusan Raja Otto dari Kekaisaran Jerman. Ibnu Syibruth juga pernah ditugaskan pemerintah Dualah Umayyah untuk melaksanakan tugas diplomasi dengan Raja Navarre.

Komunitas lainnya yang menempati wilayah Andalusia pada masa kekuasaan Daulah Umayyah adalah bangsa Slavia. Eksistensi bangsa Slavia di Andalusia tidak lepas dari peran Abdurrahman An Nashir yang mendatangkan mereka untuk mengimbangi kecenderungan Arabisme di Andalusia. Bagi An-Nashir, jika dibiarkan saja, kecenderungan Arabisme ini justru akan menimbulkan perpecahan dan pergolakan sosial-politik di Andalusia. Sebab keistimewaan-keistimewaan yang didapatkan oleh komunitas Arab tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial dari komunitas lainnya. Hal ini terbukti dari kasus bangsa Berber. Oleh karena itu, An-Nashir merekrut bangsa Slavia untuk dididik menjadi anggota militer dan menjadi pengawal dirinya.<sup>21</sup>

### Kesimpulan

Struktur masyarakat di Damaskus terdiri dari empat komponen utama, yaitu: *Pertama*, Kelas sosial kesatu, yaitu bangsa Muslim-Arab menempati kelas tertinggi dalam stratifikasi sosial di Damaskus. Mereka adalah para elit penguasa Daulah Umayyah; *Kedua*, Kelas sosial kedua, yaitu golongan muallaf, orang yang baru memeluk agama Islam. Dengan demikian, mereka diakui secara penuh sebagai warga negara Muslim; *Kedua*, Kelas sosial ketiga, yaitu kelompok non muslim, baik yang beragama Yahudi, Kristen, Sab'a, maupun sekte-sekte kepercayaan lainnya; *Ketiga*, Kelas sosial keempat, yaitu para budak yang hidup dalam lingkungan pusat kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus. Komposisi penduduk Andalusia saat Daulah Umayyah berkuasa sangat beragam. Kelompok penduduk utama yang berdiam diri di Andalusia adalah komunitas Muslim-Arab dan suku Berber. Keduanya merupakan aktor penting dalam proses pembebasan Andalusia untuk menjadi pusat kekuasaan

<sup>21</sup> Dudung Abdurahman. 2014. *Komunitas-Multikultural dalam Sejarah Islam Periode Klasik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Halaman 66.

Daulah Umayyah di Barat. Kelompok penduduk lainnya adalah komunitas Kristen sebagai penduduk asli Andalusia. Sebagian anggota komunitas ini ada yang kemudian memeluk Islam setelah pembebasan Andalusia dari penindasan bangsa Ghotia Barat. Komunitas Muslim-Arab yang menetap di Andalusia pasca pembebasan berasal dari wilayah selatan Arab (Suku Yamani) dan wilayah utara Arab (Suku Mudhari).

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Hanif Fahrudin1, Maskuri, Hasan Busri. *Internalisasi Nilai Multikulturalisme melalui Pendidikan Islam; Interelasi Tri Sentra Pendidikan pada Masyarakat Multireligius Desa Balun Lamongan*, Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES) Volume 4, Nomor 1, Juni 2021.
- Badri Yatim. 2021. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Dudung Abdurahman. 2014. *Komunitas-Multikultural dalam Sejarah Islam Periode Klasik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Fatah Syukur. 2020. *Sejarah Peradaban Islam*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.
- Febi Januar al-Hikami. *Moderasi Beragama dalam Kerajaan Islam: Memahami Multikulturalisme dan Peradaban Islam*. Jurnal Inovasi Pendidikan, Volume 1, Nomor 3, 2023.
- H.M. Junaidi Ghony, *Konsep Dasar Multikulturalisme dalam Kurikulum*, Makalah Bahan Perkuliahuan.
- Kees De Jong, “*Al Andalus di Bawah Kekuasaan Daulah Umayyah di Cordoba (756-1031): Suatu Masyarakat Pluralistik yang Beradab*”. *Gema Teologia* (Jurnal Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana). Vol. 34 No. 1 April 2010.
- Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*.
- M. Tholchah Hasan, *Akar-Akar Nilai Inklusif dalam Multikulturalisme Islam*, Makalah Bahan Kuliah Multidisiplin Pendidikan Islam Multikultural, Universitas Islam Malang.
- M. Tholchah Hasan, 2011, *Peran Penelitian dalam Mengangkat Kemampuan Sumber Daya Manusia untuk Menunjang Pembangunan di Indonesia*. Malang: Visipress Media.
- Philip K. Hitti, *The History of The Arabs*, terj., (Bandung: Serambi, 2008).
- Sobirin Bagus dan Maskuri Bakri. *Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural pada Da'i Badan Koordinasi Masjid dan Musholla Kabupaten Kutai Timur*. : Jurnal Studi dan Sosial, Volume 8, Nomor 2, Oktober 2021.